

SEKOLAH POLISI NEGARA (SPN) PADANG BESI

1961-2002

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Salah Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya*

OLEH

VITRY WIDYANINGSIH

07181035



JURUSAN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2012

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi 1961-2002”. Sekolah ini merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mendidik dan membekali nilai-nilai idealisme serta patriotisme sehingga dapat menghasilkan anggota polisi yang berdisiplin dan bermoral. Batasan awal penulisan ini adalah tahun 1961 karena pada tahun ini merupakan awal didirikannya SPN Padang Besi. Batasan akhir yang diambil adalah tahun 2002 karena pada tahun ini polisi pisah dari TNI sehingga polisi bisa menjalankan kewenangannya sendiri, hal ini berpengaruh terhadap sistem pendidikan di SPN.

Sebagaimana lazimnya studi sejarah, maka penelitian ini menggunakan metode sejarah. Sebagai langkah awal dilakukan pengumpulan bahan sumber (heuristik). Dalam penelitian ini didapatkan berbagai jenis sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Dikarenakan penelitian ini bersifat sejarah kontemporer, maka sumber yang digunakan juga banyak berasal dari sumber wawancara karena kurangnya arsip yang ditemukan. Sumber lisan ini kemudian diperkuat dengan sumber tulisan, sehingga kedua sumber ini dapat saling melengkapi. Setelah sumber diperoleh, kemudian dilakukan kritik, baik kritik interen maupun kritik eksteren. Langkah berikutnya adalah melakukan interpretasi. Terakhir dilaksanakan tahap penulisan dalam bentuk skripsi ini.

Pada tahun 1961 SPN Padang Besi didirikan untuk mengisi kekosongan personil polisi yang sangat kurang di wilayah Sumatera Barat akibat pemberontakan PRRI. Dalam perjalanan sekolah ini terdiri dari tiga periode, yakni masa Orde Lama 1961-1966, Orde Baru 1966-1998, dan Reformasi 1998-2002. Dari penelitian ini terlihat perbedaan antara ketiga periode tersebut, diantaranya SPN pada masa Orde Lama dimana pendidikan polisi dipersiapkan untuk menjaga keamanan akibat pergolakan yang terjadi, sehingga dalam pendidikan hanya bersifat kepada tugas polisi umum. Pada masa Orde Baru polisi berada dibawah naungan TNI sehingga latihannya bersifat militeristik, latihan ini selain untuk melatih polisi dalam menjaga keamanan masyarakat juga dilatih untuk berperang, latihan yang keras ini berdampak terhadap sikap polisi yang arogansi dalam menghadapi masyarakat. Pada masa Reformasi polisi lebih dipersiapkan untuk menjadi polisi sipil yang bertugas melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Perbedaan lainnya terlihat pada kurikulum pendidikan dimana pada Orde Lama hanya mempelajari dasar prajurit, pada masa Orde Baru kurikulum lebih bersifat militer, sedangkan masa Reformasi kurikulumnya berubah menjadi polisi sipil.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencitraan anggota polisi di mata masyarakat saat ini sudah terlanjur buruk, hal ini disebabkan oleh perilaku sebagian anggota polisi itu yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian. Seharusnya aparat kepolisian menjalankan fungsi pemerintahan dengan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Kenyataannya yang dilihat sekarang malah sebaliknya, sebagian aparat kepolisian masih saja memperlihatkan sikap arogansinya terhadap masyarakat.

Tidak sedikit pula anggota polisi nakal yang terlibat masalah hukum seperti pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), penggunaan kekerasan dalam penyidikan, persengkokolan polisi dengan penjahat dalam kasus-kasus kriminal, budaya korupsi, tindakan penyalahgunaan narkoba. Banyaknya bermunculan kasus hukum yang melibatkan anggota kepolisian membuat citra korps Bhayangkara menurun di kalangan masyarakat.

Benarkah perilaku anggota polisi yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian berawal dari proses pendidikan yang mereka dapat melalui lembaga pendidikan kepolisian? Seharusnya pendidikan polisi melalui Sekolah Polisi Negara (SPN) bertujuan untuk mendidik, dan untuk mewujudkan sikap dasar kebhayangkaraan berawal dari pendidikan.

Proses pendidikan yang didapatkan calon anggota polisi di Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi tidak terlepas dari perjalanan sejarah yang mewarnai perkembangan pendidikan di SPN Padang Besi. Pendidikan yang didapat sejak awal pendirian SPN Padang Besi hingga sekarang sangat berbeda, hal ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 1960 jumlah anggota kepolisian khususnya di Propinsi Sumatera Barat sangat kurang, hal ini disebabkan oleh kondisi politik di Sumatera Barat yang masih kacau

akibat terjadinya pemberontakan PRRI. Pemberontakan yang terjadi mengakibatkan dampak terhadap kurangnya aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas menjaga kestabilan dan keamanan masyarakat.¹

Pada tanggal 30 Desember 1961, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kepala Kepolisian Negara No. Pol. :62/SK/MK/1961 didirikanlah SPN Cabang Padang Besi di Sumatera Barat yang secara administratif membawahi Kepala Polisi Komisariat Sumatera Barat dan secara teknis berada dibawah Komando Pendidikan dan Latihan Kepolisian Republik Indonesia (KOPLAKRI).²

Pembangunan SPN Padang Besi juga bersamaan dengan pembangunan SPN-SPN di beberapa kota di Indonesia, yakni Sekolah Polisi Negara Deli Serdang (Sumatera Utara), Betung (Sumatera Selatan), Ciputat (Jakarta), Candi (Jawa Tengah), Maribaya (Jawa Barat), Purwokerto (Jawa Tengah), Mojokerto (Jawa Timur), Masohi (Maluku), dan lain-lain.³

Pendirian bangunan SPN Padang Besi ini menggunakan lahan yang dihibahkan oleh penduduk Padang Besi yang terdiri dari suku Jambak, Melayu, Sipanjang, Koto, Piliang, Caniago dengan lahan seluas 17,4 ha dengan syarat lahan tersebut tidak boleh diperjualbelikan, hanya boleh digunakan untuk pendidikan kepolisian.⁴ Pelaksanaan pembangunan SPN Padang Besi ini belum sempurna, tapi karena kebutuhan yang sangat mendesak maka pada bulan Juli 1962 dilakukan upacara pembukaan pendidikan untuk agen polisi tingkat pertama.⁵

Angkatan pertama dari agen polisi ini berjumlah 240 orang yang sebagian besar lulusan SR.⁶ Selain syarat berpendidikan sekolah rakyat, maka calon siswa harus melewati beberapa seleksi, antara lain: kesehatan, jasmani, pengetahuan umum dan mental ideologi. Lamanya

¹ Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi, *24 Tahun Pengabdian Dodiklat Padang Besi*, (Padang : Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi, 1985), hal.43.

² *Ibid*

³ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Sejarah TNI Jilid III (1960-1965)*, (Jakarta : Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000), hal. 56.

⁴ *Surat Keputusan KAN Lubuk.Kilangan Nomor 31/KAN/LK/IV-1989.*

⁵ Agen polisi merupakan anggota polisi penjaga keamanan.

⁶ Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi, *op. cit.*, hal.43.

pendidikan yang ditempuh siswa agen polisi adalah selama 6 bulan. Mereka mendapat pelajaran secara teori dan praktik di lapangan, sesuai dengan kurikulum pendidikan polisi.

Pada awal pembangunan kompleks SPN Padang Besi, sering ditemukan siswa yang ikut serta secara aktif melaksanakan penyelesaian bangunan fasilitas pendidikan. Selama proses pembangunan para siswa menggunakan garase mobil dan rumah sakit untuk ruang belajar. Tenaga instruktur pendidikan SPN pada awal pendidikan berasal dari anggota polri yang telah menyelesaikan pendidikan di Akademi Polisi dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).⁷

Pada tanggal 15 Januari 1963 secara resmi pendidikan Agen Polisi meluluskan siswa SPN Padang Besi sebanyak 239 siswa dan dilantik oleh Kepala Polisi Komisariat Sumatera Barat yaitu Komisariss Besar Polisi Drs. Soebroto Brotodiredjo,SH, sebanyak 25 orang diantaranya langsung ditempatkan dan ditugaskan di SPN Padang Besi sedangkan yang lainnya mulai mengisi kekosongan di berbagai wilayah khususnya di Sumatera Barat.⁸

Dari awal pendirian SPN telah mengalami beberapa kali perubahan nama, hal ini demi penyesuaian dengan struktur organisasi dalam rangka reorganisasi polri. Surat Keputusan Menteri/ Kepala Staf Angkatan Kepolisian RI. No. Pol.:27/SK/MK/1963 tanggal 16 Mei 1963 yang berisi perintah SPN dirubah namanya menjadi SAK (Sekolah Angkatan Kepolisian). Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian No.Pol:42/SK/MK1964 pada tanggal 11 Agustus 1964 seluruh SAK dirubah kembali nama dan statusnya menjadi Depo Pendidikan dan Latihan (DEPLAT) sedangkan nama Kepala Sekolah Angkatan Kepolisian Cabang diganti menjadi Komandan Depo Pendidikan dan Latihan. DEPLAT dirubah menjadi DODIKLAT (Depo Pendidikan dan Latihan) berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol.:41/SK/MK/KAPOLRI/1971 pada tanggal 25 April 1971 dan sebutan Komandan Dodiklat dirubah menjadi Kepala Dodiklat. Dengan adanya reorganisasi di lingkungan polri,

⁷ Alumni Sekolah Polisi Bagian Tinggi Sukabumi (Kotoka), *Sejarah Pendidikan dan Patriotisme Kepolisian*, (Jakarta: Alumni Sekolah Polisi Bagian Tinggi Sukabumi (Kotoka), 1993), hal. 55.

⁸Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi, *op. cit.*, hal.44.

berdasarkan Skep Kapolri Nomor : Skep/07/VII/1985 Dodiklat kembali menggunakan nama SPN (Sekolah Polisi Negara) dibawah Dit Diklat Polda.⁹

Sektor pendidikan polri yang semula ditingkat pusat disebut Kobangdiklat (Komando Pengembangan Pendidikan dan Latihan), setelah reorganisasi diroboh menjadi Direktorat Pendidikan polri. Hal ini dilakukan karena organisasi polri ditingkat Mabes dan Polda yang semula menganut sistem organisasi Komando dirubah menjadi sistem Direktorat. Namun pada prinsipnya beban tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Direktorat Pendidikan polri dan jajarannya tetaplah sama, yakni membina, mengelola dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan polri.¹⁰

Sejak awal pendirian Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi dari tahun 1961 hingga tahun 2002 telah menghasilkan lulusan sekitar 10.422 personil kepolisian¹¹ yang bertugas di berbagai wilayah di Indonesia, tidak sedikit dari mereka yang menduduki jabatan penting di instansi kepolisian terkait.

Bertitik tolak pada kenyataan tersebut, sangat menarik untuk mengungkapkan sebuah tulisan mengenai Sejarah Pendidikan Polisi yang mana Sekolah Polisi Negara (SPN) telah mendidik, melatih fisik maupun mental untuk dapat menghasilkan polisi-polisi terampil. Pendidikan polisi yang berada di Sumatera Barat dikenal dengan Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi. Penelitian ini juga didorong oleh masih sedikitnya penulisan tentang lembaga pendidikan SPN Padang Besi khususnya dalam kerangka analisis sejarah.

Beberapa tulisan yang berkaitan dengan Sekolah Polisi Negara yang penulis temukan diantaranya adalah tulisan Ani Purwanti yang berjudul *Profil Sekolah Polisi Negara (SPN) di Jawa Tengah*, ditulis pada tahun 2003.¹² Tulisan ini membahas tentang pendidikan Sekolah

⁹ *Ibid.*, hal.45.

¹⁰ Alumni Sekolah Polisi Bagian Tinggi Sukabumi (Kotoka), *op. cit.*, hal. 59.

¹¹ *Data Siswa Tahun 1961-2002*

¹² Ani Purwanti, *Profil Sekolah Polisi Negara (SPN) di Jawa Tengah*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2003), hal. 50.

Polisi Negara (SPN) di Jawa Tengah, dimana SPN Jawa Tengah sebagai lembaga pendidikan dasar polisi dalam rangka menyiapkan polisi profesional dan mandiri. Sekolah Polisi Negara Purwokerto mendidik polisi bintara untuk wilayah Jawa Tengah. Selama ini pola pendidikan yang diterapkan adalah 6 bulan proses belajar dan setelah itu langsung bertugas di masyarakat baik sebagai penjaga ketertiban masyarakat maupun ujung tombak penegakan hukum serta tantangan terbesar saat ini yaitu bukan sebagai alat penguasa.

Tulisan tentang lembaga pendidikan sekolah kepolisian lainnya ditulis oleh Satjipto Rahardjo yang berjudul *Membangun Polisi Sipil*,¹³. Tulisan Satjipto Rahardjo membahas tentang pendidikan Polri dengan memakai konsep *flexeducation* artinya suatu pola pendidikan yang menyiapkan para anak didik untuk mengembangkan sikap dasar yang luwes pada waktu harus menjalankan pekerjaan pemolisian di masyarakat nanti.

Tulisan lain yang membahas tentang Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi yang berjudul “*24 Tahun Pengabdian Dodiklat Padang Besi*”. Dalam buku ini membahas awal pendirian SPN Padang Besi serta perkembangan pendidikan SPN Padang Besi dari tahun 1961-1985. Buku ini hanya sebagian menggambarkan pendidikan yang ada di SPN Padang Besi hingga tahun 1985.

Berdasarkan dari hasil karya tulis yang disebut di atas, belum ada yang melakukan penelitian kepada Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi selama (41 tahun). Oleh karena itu, penulisan ini diberi judul, ***Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi 1961-2002***.

¹³Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007), hal. 23.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Skripsi ini mengkaji tentang Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi 1961-2002. Untuk lebih memfokuskan kajian mengenai SPN Padang Besi ini maka dicoba mrumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah latar belakang berdirinya Sekolah Polisi Negara (SPN) di Padang Besi
2. Bagaimana perkembangan Sekolah Polisi Negara dalam kurun waktu 1961-2002?
3. Bagaimana penerapan kurikulum Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi selama tiga periode yaitu Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi?

Batasan temporal yang diambil yakni dari tahun 1961-2002. Tahun 1961 diambil sebagai batasan temporal awal karena pada tahun 1961 inilah Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi didirikan. Batasan temporalnya didasarkan pada manajemen pengelolaan sekolah oleh Polri ketika dibawah naungan Tentara Nasional Indonesia, yaitu pada awal pendiriannya tahun 1961 dan berakhir pada tahun 2002, saat Polri sudah tidak berada di bawah naungan TNI. Sehingga Polri bisa menjalankan kewenangannya sendiri sebagai aparat keamanan dan ketertiban. Hal ini juga berpengaruh terhadap sistem pendidikan di SPN.

Batasan spasial yakni terfokus di kota Padang. Batasan spasial ini diambil karena Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi ini terletak dan didirikan di Kota Padang, tepatnya di daerah Padang Besi.

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan penulisan adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi.
2. Untuk mengetahui perkembangan Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi dalam kurun waktu 1961-2002.
3. Untuk mengetahui penerapan kurikulum Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi selama tiga periode yaitu Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi

Sedangkan manfaat penelitian adalah untuk menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dalam hal penelitian, dan manfaat penelitian bagi masyarakat yaitu untuk memperkaya khasanah penulisan dalam penelitian ilmiah.